

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan persaingan globalisasi pada persaingan bisnis berkembang sangat pesat. Hal tersebut dilihat dari perkembangan dalam informasi dan teknologi yang mendorong suatu perusahaan agar terus berkembang (Rivandi, 2018:41). Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah instansi swasta maupun pemerintah dalam memproses dan melaporkan suatu informasi, terutama informasi keuangan. Pengolahan informasi keuangan secara efektif dan efisien dapat dicapai dengan tersedianya sistem informasi yang dapat diandalkan, cepat, dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan (Ira Puspita, Sri Witurachmi, dan Nurhasan Hamidi, 2016:78)

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dicapai pada setiap periode (satu tahun). Laporan keuangan merupakan suatu landasan informasi bagi penggunaannya sebagai salah satu elemen dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai proses dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan gambaran sebagai indikator keberhasilan satu pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya (Ariska, Cici, Rudi Masniadi, 2019:18). Kualitas Laporan Keuangan yaitu sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur, dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang

berkepentingan (Riswan Kesuma, 2014:2). Kualitas Laporan Keuangan yaitu sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur, dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan (Emilda Ihsanti, 2014:4)

Ayu Purrining Tyas (2014:5) mengemukakan bahwa Pentingnya Laporan Keuangan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dan kinerja suatu entitas. Laporan Keuangan merupakan hasil dari bidang ilmu akuntansi. Adapun Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat itu atau periode kedepannya (Kasmir, 2016:66). Dalam bidang pemerintahan, pelaporan keuangan memiliki tujuan yakni informasi yang disediakan dapat memiliki manfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan kinerja pemerintah, juga dalam pengambilan keputusan terkait sosial, politik, dan ekonomi. (Dwi Susanto, 2015)

Karakteristik atau Indikator dari Kualitas Laporan Keuangan menurut (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadani, 2014:16-17) adalah a. dapat dipahami (kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan mudah dipahami pemakai), b. relevan (informasi yang dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi atau mengoreksi hasil evaluasi), c. keandalan (menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat di verifikasi), d. dapat diperbandingkan (laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu).

Fenomena yang terdapat pada penelitian ini mengenai dengan adanya laporan keuangan yang tidak berkualitas yaitu indikator yang tidak dapat dipenuhi adalah laporan keuangan yang tidak relevan karena tidak didukung dengan

perhitungan yang akurat dan rincian yang lengkap sehingga tidak diyakini atau diverifikasi kewajarannya. Hal ini dilansir pada tanggal 31 Mei 2018, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa menyatakan dan menjelaskan persoalan pelaporan keuangan dari tiga daerah tersebut beragam dan tidak bisa dikoreksi. BPK Perwakilan Jabar masih memberikan pengecualian kepada tiga daerah tersebut. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa mengemukakan “Kota Bandung yakni ada beberapa kontrak penyewaan tanah yang tidak jelas pembaharuan kontraknya. Sehingga, tidak ada perhitungan akurat mengenai piutang penyewaan tanah tersebut”.

Persoalan lainnya, tutur dia, “adanya aset tetap senilai Rp 694 miliar milik Pemkot Bandung. Namun, sambung dia, aset senilai Rp 400an miliar berupa gedung, bangunan dan mesin tidak jelas keberadannya”. “Ada juga persoalan sebagian saldo jangka pendek tidak ada rinciannya. Rincian ini harusnya ada supaya kita bisa verifikasi ini utang wajar atau enggak,” jelas dia. Sementara untuk Kabupaten Subang, BPK Perwakilan Jabar menemukan adanya persoalan pengambilalihan pasar baru senilai Rp 10,8 miliar. Pemkab Subang belum menginventarisir piutang dari proses pengambilalihan pasar baru. “Selain itu adanya penyusutan aset senilai Rp 53 miliar yang tidak dijelaskan angka tersebut didapat darimana. Harusnya kan dijelaskan secara akuntabel perhitungan penyusutan aset tersebut,” kata dia. Lalu untuk Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung

rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian. (<https://news.detik.com/>)

Selanjutnya fenomena terkait dengan Kualitas Laporan Keuangan yaitu laporan keuangan yang tidak tersaji lengkap sehingga tidak mudah untuk diperbandingkan. Menurut Lili yang merupakan analis keuangan di BPKA Kota Bandung mengatakan bahwa terkadang akun rekening utang jangka pendek dan akun-akun lainnya tidak muncul report neraca di simda keuangan padahal di dalam akun tersebut terdapat nilai saldo awalnya sehingga sulit untuk diperbandingkan dengan neraca tahun lalu. (Lili:2021)

Dari fenomena yang telah disebutkan diatas menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terjadi karena laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kurang berkualitas dan tidak disajikan dengan perhitungan yang akurat dan juga kurang lengkap. Sehingga tidak diyakini tentang kewajarannya dan juga tidak sesuai dengan indikator relevan (informasi yang dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi atau mengoreksi hasil evaluasi), dan tidak dapat diperbandingkan (laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sumber daya manusia, dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat memahami bagaimana proses serta pelaksanaan akuntansi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Heni Sundari, 2016:2).

Indra Bastian, 2010:55) menyatakan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Gumelar, 2017:15) Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia memiliki peran utama dalam setiap kegiatan organisasi baik organisasi pemerintahan maupun swasta (Dahlia, 2017:1).

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya manusia adalah kumpulan dari sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu (Yoyo Sudaryo, Agus Ariwibowo & Nunung Ayu Sofiati, 2018:3). Kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kualitas yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dibidang pengelola keuangan (Fidyah Yuli Rokhmad Budiyo, 2019:2).

Indikator yang digunakan penulis dalam mengukur Kualitas Sumber Daya Manusia adalah a.pendidikan (proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai macam ilmu pengetahuan secara bertahap), b.pelatihan (adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi

tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya). (Soekidjo Notoatmodjo, 2009:16).

Fenomena yang terdapat dalam penelitian ini ditemukan mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan indikator Pendidikan dan Pelatihan. Telah ditemukan Sumber Daya Manusia yang telah terlibat dalam pembuatan laporan keuangan/bidang keuangan di pemerintah Kota Bandung tidak hanya pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi namun dengan latar Pendidikan yang berbeda beda, sehingga dalam ketidaksesuaian Pendidikan ini menjadi kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Serta masih terdapat pegawai-pegawai yang kurang kompeten dalam menggunakan suatu sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga masih perlu dibenahi untuk melakukan pelatihan untuk mengatasi masalah tersebut. (Kepala Sekretariat BPKA Kota Bandung, Irawan, 2021).

Fenomena dalam kasus lainnya yang dapat diartikan bahwa perlu adanya Pendidikan dan pelatihan ditemukan bahwa Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar Arman Syifa menilai akuntan mempunyai peran penting dalam pembukuan keuangan pemerintah daerah. Ia meminta daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk menambah tenaga akuntan. BPK Perwakilan Jabar baru saja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) TA 2017/2018 kabupaten/kota. Hasilnya ada tiga daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). "Saya memandang seperti di Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung itu

memang kekurangan SDM (akuntan)," kata Arman usai penyerahan LKPD di kantor BPK Perwakilan Jabar, Jalan Moh Toha, Kota Bandung, Rabu (30/5/2018). (<https://news.detik.com/>)

Dari fenomena diatas terkait dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa terdapat pegawai yang ikut andil dalam membuat laporan keuangan yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan karena kurang kompeten di bidangnya dan juga kurangnya pelatihan untuk membuat laporan keuangan dan tentunya berkaitan dengan indikator yang digunakan penulis yaitu pendidikan dan pelatihan.

Selain faktor Kualitas Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi merupakan faktor penentu yang berpengaruh dalam Kualitas Laporan Keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi yang berkualitas juga (Rapina, 2014). Sistem informasi Akuntansi adalah Suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasikan formulir, catatan dan laporan yang dikordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan (Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini, 2011:57). Selain itu terdapat juga pengertian Sistem informasi Akuntansi menurut (Laudon, 2013:52) Sistem informasi akuntansi adalah Kumpulan atau group dari sub sistem/komponen/ bagian apapun baik fisik/non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Karena Kualitas Laporan Keuangan dapat dipengaruhi juga oleh sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 2011).

Indikator yang digunakan penulis dalam mengukur Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi adalah *a. user satisfaction* (pengukuran tingkat kepuasan pengguna sistem informasi dapat diukur dengan *Flexible, Accesible, Efficient, Provides Correct and Timely Information*), *b. system use* (Penggunaan sistem diukur dengan *Security, Processing Integrity, Availability, Easy to Use and Usefulness*).

Adapun fenomena terkait sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi akuntansi yang tidak mudah digunakan sehingga tidak sesuai dengan indikator (*Easy to use and usefulness*). Kehadiran IT sedianya untuk mempermudah, mempercepat, memperlancar pekerjaan. Namun Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), menilai yang terjadi pada Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) justru sebaliknya. Direktur Eksekutif Alipp, Uday Suhada mengatakan, Pemprov, Kabupaten & Kota di seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD. Tapi semuanya tidak bisa langsung memanfaatkan teknologi yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri tersebut. “Setelah dilacak, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan sekedar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Di Pemprov Banten sendiri sejak Januari

dilakukan secara manual,” ujarnya. “Per hari ini (red Senin 22/02/2021), kegiatan jadi kacau dan banyak yang belum berjalan. Padahal sebelum SIMRAL pun ada SIMDA yang cukup baik, kelemahannya tidak online (masih dekstop) dari BPKP,” ungkapnya.(<https://pojoksatu.id/banten/2021/02/22/aplikasi-sipd-dianggapkacau/?amp>)

Fenomena lainnya yang terjadi di Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Kota Bandung yaitu adanya sistem informasi akuntansi yang tidak mudah digunakan (*Easy to use and usefulness*) dan data tidak tersedia saat dibutuhkan (*availability*). Menurut Kepala Bidang Akuntansi Pendapatan Bapak Wawan Darmawan mengatakan bahwa adanya penyesuaian baru terkait penyusunan saldo awal yang diubah peraturannya menurut Kemendagri 2020 yang menyatakan bahwa untuk pencatatan saldo awal no akun untuk asset lancar, asset tetap, dan beban diubah no akunnya tetapi untuk pencatatannya tidak bisa langsung impor data, sehingga dalam penyusunan untuk periode saldo awal tahun berikutnya harus di input manual. Dalam hal ini tentunya menjadikan proses dalam penginputan saldo awal memakan waktu yang sangat banyak dan biaya yang sangat banyak. (Wawan:2021)

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa adanya sistem informasi akuntansi yang tidak mudah untuk digunakan karena kurang memiliki tingkat kegunaan yang diharapkan (*easy to use and usefulness*), dan data yang dibutuhkan tidak tersedia (*Availability*).

Terdapat hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dijadikan sebagai alasan penelitian, yaitu diantaranya penelitian

yang telah dilakukan oleh Erma S. (2018), Intan Kurniawati & Rispantyo Djoko Kristianto (2019), Cipmawati Mohune (2013). Dimana hasil tersebut menjelaskan mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zulfah dan Nurhafaza (2018), Katty Aryanti Martina (2016), Prasisca dan Yunita (2017), Yafika Mutiara Rahma (2018:9) dan Almumtahanah & Samukri (2019:8), dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, terdapat *Research Gap* atau perbedaan hasil penelitian yang mendukung teori dan tidak mendukung teori, seperti contohnya penelitian penelitian yang dilakukan oleh Franta Eveline (2016:12) Marisa Eka, Khusnatul Zulfa & Arif Hartono (2019:8), Kurniawati (2018:9), dimana hasil penelitian tersebut menolak atau tidak mendukungnya teori bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Franta Eveline (2016:12), Kurniawati, (2018:9), dimana hasil penelitian tersebut menolak bahwa Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang ada di SKPD Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang kurang kompeten di bidangnya karena telah ditemukan adanya pegawai yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan tetapi tidak dilatar belakangi oleh Pendidikan yang sesuai sehingga tidak termasuk ke dalam indikator pendidikan dan pelatihan akuntansi sehingga kurang optimal
2. Sistem Informasi Akuntansi di instansi pemerintah di Kota Bandung, tidak mencapai *Availability*, dan *Easy to Use and Usefulness* karena belum efektif dan masih ditemukannya sistem yang datanya tidak tersedia saat dibutuhkan, dan kurang mudah digunakan dengan aplikasi yang berbeda sehingga tidak lancar dalam pengelolaan data dan menyusun laporan keuangan.
3. Rendahnya Kualitas Laporan Keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang terkait dengan tidak relevan, dan tidak mudah untuk diperbandingkan dalam penyajian laporan keuangan dengan rincian yang tidak lengkap dalam opini WDP dari BPK mengenai pengelolaan aset dan utang dan piutang yang belum ada rinciannya, serta belum menginventarisir piutang dari proses pengambil alihan pasar baru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada proposal ini agar pembahasan yang diajukan dapat mencapai sasaran. Maka dalam pembahasannya membatasi masalah-masalah dan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan menggunakan data yang telah diperoleh dan dari uji empiris yang telah dilakukan, guna mempermudah dalam proses pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2. Untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan memecahkan masalah yang terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset khususnya dalam topik penelitian ini

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis merupakan kepentingan pengembang keilmuan, penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai kebutuhan akademis yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan terbuktinya hipotesis penelitian diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penelitian kebaruan atau penerapan ilmu terkait dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Bagi Peneliti Lain

Dengan terbuktinya hipotesis penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya terutama yang mengkaji topik mengenai Kualitas Sumber daya Manusia, dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.